

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *good corporate governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat, Sulistyanto & Lidyah (2002). *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan. Isu mengenai *good corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Krisis 1997-1998 berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis, hutang luar negeri Indonesia cukup banyak. Cadangan devisa Indonesia tidak mampu untuk menutupi jatuhnya nilai rupiah sehingga mengakibatkan nilai utang yang cukup banyak apabila dikurskan ke dalam rupiah (Bello, 1998). Banyak perusahaan yang gulung tikar dan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Penerapan konsep *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan pemegang saham.

*Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002).

Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), 2002, menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *good corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi *good corporate governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *good corporate governance* yang berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *good corporate governance* akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan sangat lemahnya penrapan *good corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia dikarenakan masih banyak pelanggaran aturan.

Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang signifikan dalam praktik *good corporate governance*. Peranan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis yang melanda Indonesia. Lembaga internasional

yang lebih awal memperkenalkan istilah *governance* adalah Bank Dunia, melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul *Governance and Development*. Definisi *governance* menurut Bank Dunia adalah “*the manner in which power is exercised in management of a country’s social and economic resources for development*”.

Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Good corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *good corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan.

Lemahnya penerapan *good corporate governance* ditandai dengan perilaku manajemen yang mulai mementingkan kepentingan sendiri, sehingga mengabaikan kepentingan *investor* (pemilik perusahaan). Hal ini menyebabkan para investor berhenti melakukan investasi di perusahaan-perusahaan di Negara tersebut, yang sebagai akibatnya, menurunkan Inflows dari Negara tersebut secara keseluruhan. Konflik kepentingan inilah yang dapat menimbulkan masalah keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) mengatakan bahwa adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola dapat menimbulkan masalah keagenan.

Masalah keagenan timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholder* dan manajer, salah satunya adalah tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, namun disisi lain manajer juga memiliki kepentingan pribadi. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan terdapat kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Hal ini dapat menyebabkan manajer selaku *agent* memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemilik. Informasi yang diberikan manajer kepada pemilik terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Manajer cenderung melaporkan perusahaan dengan kondisi yang tinggi utilitasnya. Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi (*information asymetry*) antara manajemen dan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (DuCharme et al., 2000).

Youngkie (2012) mengatakan informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistis, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Aktivitas yang bersifat rekayasa membuat laporan keuangan menjadi tidak relevan. Laporan keuangan yang dilaporkan disesuaikan dengan kepentingan manajer sehingga laporan keuangan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai media pertanggungjawaban manajer kepada pemilik (Jao dan Pagalung, 2011). Sikap oportunistis manajer inilah yang yang menjadi pemicu munculnya praktik manajemen laba pada suatu perusahaan. Pihak agen (manajemen) memiliki

dorongan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan psikologis dan ekonominya, antara lain dalam memperoleh pinjaman, investasi, maupun kontrak kompensasi (Salno dan Baridwan, 2000), sedangkan pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak yang mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang senantiasa meningkat.

*Corporate Governance* melalui *monitoring* kinerja manajemen diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin terciptanya akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan berdasarkan aturan yang ada. Konsep ini menghendaki adanya transparansi bagi semua pengguna laporan keuangan. Beberapa mekanisme *corporate governance* cukup berperan dalam penerapannya, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan empat dari mekanisme *corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan asing. Tugas dewan komisaris adalah mengawasi sekaligus memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan direksi sendiri bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Brown dan Caylor (2004) menemukan bahwa komposisi proporsi komisaris independen dapat berpengaruh memfasilitasi peningkatan kinerja operasional perusahaan. Komite audit juga bisa mempengaruhi perilaku pihak manajemen dalam praktik manajemen laba, komite audit bertugas untuk mendorong terbentuknya struktur pengawasan yang memadai, Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan

ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas auditor eksternal, mempersiapkan surat yang ditandatangani oleh ketua komite audit yang menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh *eksternal auditor*, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada para pemegang saham. Berdasarkan tugas dan fungsi komite audit yang telah dijelaskan sebelumnya, maka apabila komite audit dapat berjalan secara efektif, komite audit dapat mempengaruhi praktik manajemen laba dan kinerja pada perusahaan.

Audit berkualitas tinggi (*high quality audit*) akan lebih mendeteksi praktik akuntansi yang dipertanyakan sehingga audit berkualitas tinggi dapat menjadi alat pencegah yang efektif bagi aktivitas manajemen laba, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila pelaporan yang salah (*misreporting*) ini terdeteksi dan terungkap, hal inilah yang mendasari dugaan adanya pengaruh kualitas audit terhadap praktik manajemen laba perusahaan, serta peningkatan kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan asing dalam perusahaan mempengaruhi kinerjanya untuk beberapa alasan. Pertama, adanya perbedaan konsentrasi, dan sumber daya pendukung antara pemegang saham menentukan *power* mereka terhadap perusahaan sehingga diharapkan dapat mempengaruhi manajemen dalam mengurangi praktik manajemen laba dan berpengaruh terhadap peningkatan perusahaan.

Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan sebelumnya telah diteliti oleh Apriyanti (2008). Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) Komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing tidak

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena komisaris independen pada industri ini tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi hanya berfungsi sebagai pengawasan penerapan *corporate governance*, sedangkan komite audit diduga karena banyaknya perusahaan menggunakan komite audit hanya untuk memenuhi syarat yang diajukan pemerintah sehingga tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kinerja perusahaan, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan masuknya pengaruh investor asing tidak mempengaruhi efisiensi dan efektivitas manajemen, dan bahwa investor domestik masih lebih mempengaruhi kinerja perusahaan dan investor tidak menilai perusahaan dari banyaknya kepemilikan asing (2) auditor eksternal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena pihak manajemen pada perusahaan yang diaudit oleh auditor Big Four dapat termotivasi untuk terus memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik.

Alasan menggunakan perusahaan pertambangan sebagai sampel penelitian adalah karena kinerja perusahaan pertambangan tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, dibandingkan sektor lainnya. Padahal sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya terbesar di Indonesia, dengan peminat investor yang cukup banyak. Jakarta-Trust Securities mengemukakan indeks harga saham gabungan (IHSG) selama sepekan ini tercatat mengalami kenaikan 80,48 poin atau 1,67%. Kenaikan indeks dipimpin indeks property sebesar 3,73%, indeks perkebunan dan keuangan yang masing-masing naik 3,15 dan 1,94. Kondisi ini berbeda dengan sektor pertambangan yang rata-rata pertumbuhannya masih minus 3,45

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan.

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Membuktikan secara empiris bahwa proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Memberikan bukti empiris tentang signifikansi pengaruh faktor-faktor *corporate governance* terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan.
2. Membantu manajemen perusahaan untuk menganalisis dampak ke kinerja perusahaan dan praktik manajemen laba apabila menerapkan *Good Corporate Governance*.



3. Bagi penulis dapat memberikan wawasan kepada penulis mengenai penerapan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya bagi perusahaan.
4. Bagi peneliti lain dapat memberikan gambaran mengenai *Good Corporate Governance* pada suatu badan usaha dan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam membahas pengaruh dari *Good Corporate Governance*.

## **1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN**

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang gambaran dari masalah yang diangkat oleh peneliti serta beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan singkat.

### **BAB 2. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menyajikan teori-teori yang menjadi dasar penulisan skripsi, misalnya mengenai *Good Corporate Governance* disertai dengan penelitian sebelumnya tentang *Good Corporate Governance*.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, teknik pengambilan data, teknik pengumpulan sampel

penelitian, dan teknis yang digunakan untuk menganalisis data.

#### BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan deskripsi umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisa terhadap data, analisis model dan pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap permasalahan berdasarkan analisis yang dilakukan. Dalam analisis dijabarkan data dan teknis analisis, penjelasan tentang proses analisis, dan interpretasi.

#### BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diajukan dan digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.